

ABSTRAK
PENGATURAN HUKUM HAK-HAK
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh
Rika Nabila

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan pemenuhan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sering terkendala oleh keterlambatan pembayaran gaji yang disebabkan oleh masalah administrasi, alokasi anggaran daerah, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah implementasi perlindungan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Lampung Barat? 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perlindungan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Lampung Barat?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Implementasi kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Lampung Barat bahwa secara substantif telah tercapai dan selaras dengan UU ASN, seperti gaji, sertifikasi, jaminan hari tua dan bantuan hukum. Faktor yang mempengaruhi hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, faktor pendukung seperti pemenuhan hak di lingkungan kerja, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, kesempatan pengembangan kompetensi, serta bantuan hukum yang memadai. faktor penghambat, perlindungan ini masih menghadapi kendala keterlambatan pembayaran gaji akibat proses administrasi yang panjang.

Kata Kunci: ASN, PPPK, Perlindungan Hak

ABSTRACT

LEGAL REGULATIONS ON THE RIGHTS OF CIVIL SERVANTS WITH EMPLOYMENT AGREEMENTS IN WEST LAMPUNG REGENCY

By

Rika Nabila

Government Employees with Employment Agreements are required to carry out government duties in accordance with Article 1 point (4) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2018 concerning the Management of Government Employees with Employment Agreements. The state must provide certainty regarding matters that can be established as benchmarks for determining the fulfillment of the rights of Government Employees with Employment Agreements, which are often hampered by late salary payments caused by administrative problems, regional budget allocations, and suboptimal coordination between agencies.

The problems in this thesis are: 1) How is the implementation of the protection of the rights of government employees with employment agreements in West Lampung Regency? 2) What factors influence the protection of the rights of Government Employees with Employment Agreements in West Lampung Regency? This research uses a normative and empirical approach, with primary and secondary data, where each data is obtained from library and field research. Data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show: The implementation of the policy of government employees with work agreements in West Lampung Regency has been substantively achieved and is in line with the ASN Law, such as salary, certification, old age security and legal aid. Factors that influence the rights of government employees with work agreements, supporting factors such as the fulfillment of rights in the work environment, complaint mechanisms and dispute resolution, opportunities for competency development, and adequate legal aid. Inhibiting factors, this protection still faces obstacles in the delay of salary payments due to the long administrative process.

Keywords: Civil Servants, PPPK, Rights Protection